



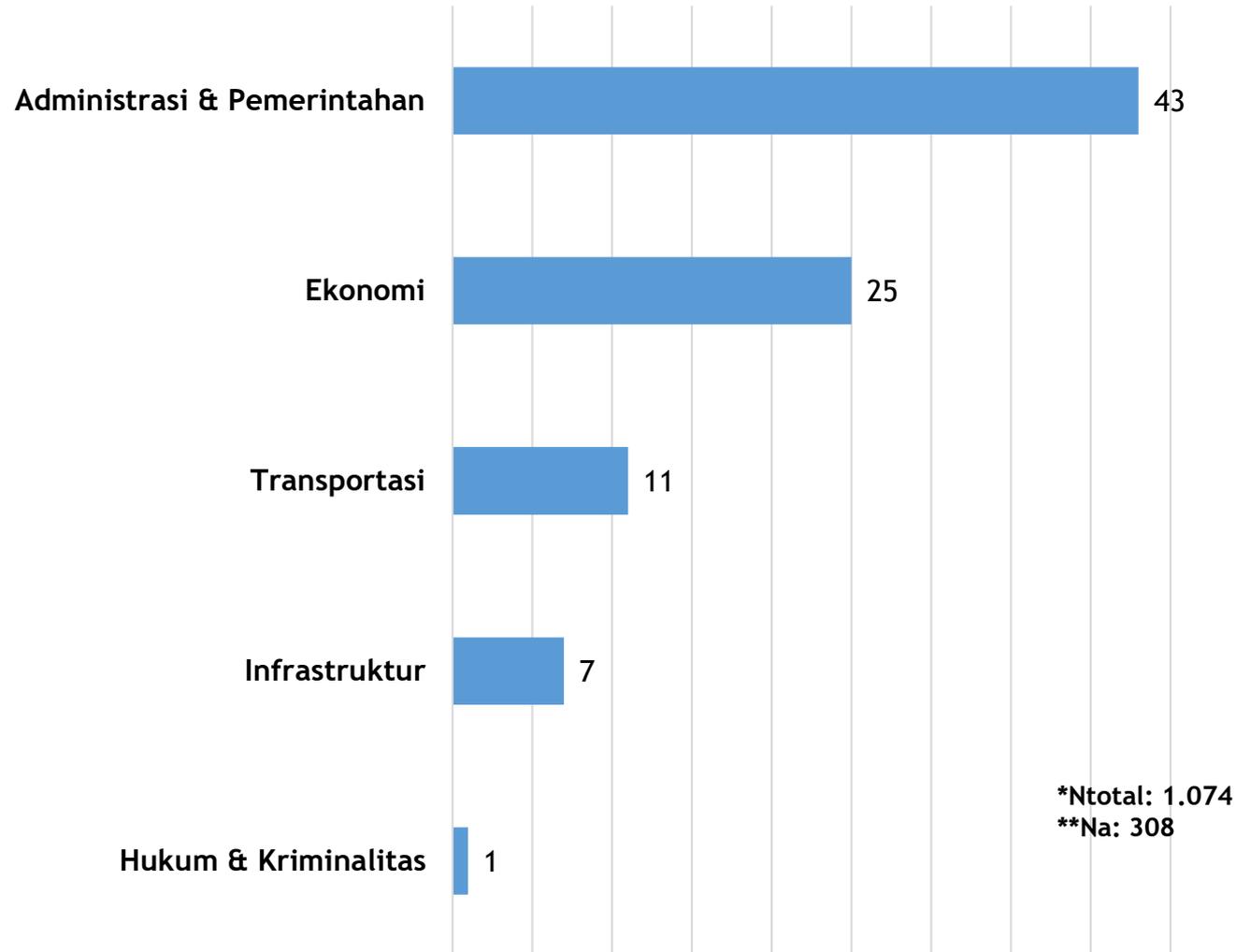
LAPORAN MINGGUAN ANALISIS POLITIK BADAN KESBANGPOL KOTA PEKANBARU

Pantauan Media Massa: 17 - 23 Juni 2019



INDONESIAINDICATOR

PERISTIWA INTERNAL PEMKO



SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Penertiban Parkir Liar	Oknum juru parkir liar di depan Mal SKA meminta uang retribusi parkir lebih dari yang ditetapkan. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, meminta UPTD Parkir segera menertibkan parkir liar tersebut. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Khairunnas, mengaku sulit mengatasi juru parkir liar dan mengimbau masyarakat tidak membayar parkir kepada juru parkir ilegal.	3	Pemko melalui UPTD Parkir perlu segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan juru parkir liar yang mematok tarif lebih tinggi dan meresahkan warga Pekanbaru. Langkah ini perlu dipublikasikan untuk mengimbangi informasi terkait rencana Pemko yang akan melelang pengelolaan parkir di Pekanbaru. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui keseriusan Pemko membenahi sektor parkir untuk memaksimalkan penerimaan PAD Kota Pekanbaru.
Tunjangan Guru Tersertifikasi	Pemko belum bisa memutuskan kebijakan terkait tunjangan penambahan penghasilan (TPP) guru tersertifikasi karena belum menerima surat rekomendasi dari Kemendagri dan Kemenpan RB.	1	Pemko sebaiknya terus memublikasikan progres realisasi pemberian TPP untuk guru tersertifikasi. Hal ini untuk menginformasikan kepada masyarakat, khususnya guru tersertifikasi, bahwa Pemko serius menanggapi tuntutan guru sekaligus mencegah terulangnya aksi demo.

SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Pengelolaan Aset dan Fasilitas Publik	<p>Rencana Pemko yang akan mengalihkan wewenang pengelolaan Pasar Cik Puan ke mendapat kritik dari beberapa pihak. Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, mengimbau Pemko menggelar <i>public hearing</i> terkait pengelolaan Pasar Cik Puan agar tidak ada pro-kontra di masyarakat nantinya serta mengurus administrasi pengelolaan lahan pasar.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Kordias Pasaribu, juga meminta Pemko mengutamakan pedagang kecil untuk menempati pasar tersebut guna mendongkrak ekonomi mikro. Pengamat Perkotaan, Mardianto Manan, juga mengkritisi rencana Wali Kota Pekanbaru yang hendak membangun Pasar Cik Puan dengan konsep pasar modern.</p>	15	<p>Pemko perlu segera menanggapi saran dan kritik dari berbagai pihak terkait rencana pengalihan wewenang pengelolaan Pasar Cik Puan ke pihak ketiga. Usulan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru agar Pemko menggelar <i>public hearing</i> juga bisa dipertimbangkan untuk menjangkau aspirasi pedagang. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang diputuskan Pemko tidak memicu konflik nantinya.</p>

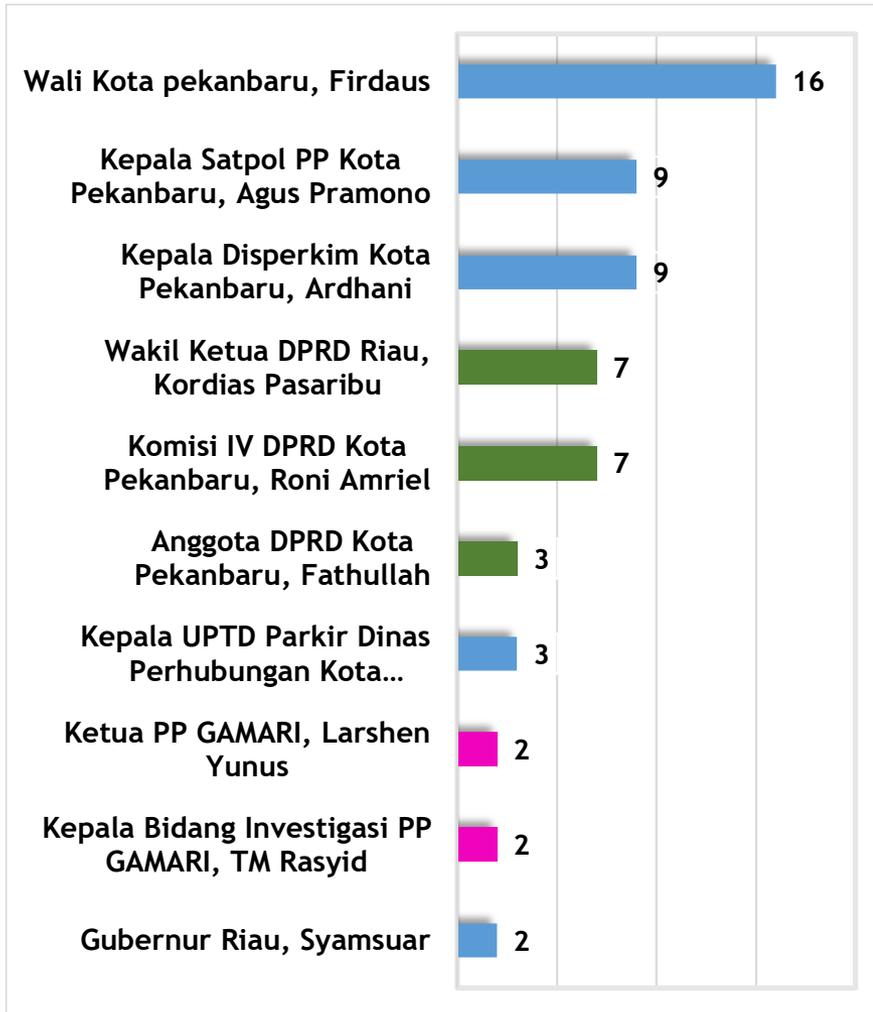
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Pengelolaan Aset dan Fasilitas Publik	<p>Sebanyak 23 kepala keluarga penghuni rusunawa Yos Sudarso yang belum membayar sewa hingga kini. Wali Kota Pekanbaru menginstruksikan OPD segera menertibkan penghuni yang enggan membayar sewa. Sementara itu, Disperkim Kota Pekanbaru bersama Satpol PP akan menertibkan penghuni yang tidak kunjung membayar hingga Rabu (19/6).</p>	<p>9</p>	<p>Pemko diharapkan memublikasikan realisasi rencana penertiban penghuni rusunawa Yos Sudarso yang enggan membayar sewa. Hal ini perlu mengingat Pemko sudah mewacanakan akan menertibkan penghuni yang membandel tersebut usai Lebaran serta memastikan penerimaan PAD Pekanbaru dapat sesuai target.</p>
Kebijakan Pengadaan Sarung	<p>Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Pembawa Suara Pemberantas Korupsi Kolusi Kriminal Ekonomi Republik Indonesia (IPSPK3RI), Ganda Mora, menilai kebijakan pengadaan kain sarung setiap Ramadan tidak terlalu penting dan terkesan dipaksakan. Ganda mengatakan Pemko seharusnya lebih memprioritaskan kebijakan yang menjadi kebutuhan warga serta bersama DPRD Kota Pekanbaru harus mengevaluasi kebijakan pengadaan sarung untuk tahun selanjutnya.</p>	<p>1</p>	<p>Pemko sebaiknya mempertimbangkan kritik dan saran dari LSM anti korupsi untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan sarung yang dinilai kurang penting. Pemko juga bisa mengklarifikasi urgensi kebijakan tersebut serta memublikasikannya melalui media. Hal ini penting untuk memastikan Pemko melakukan rasionalisasi anggaran.</p>
Bantuan untuk Nelayan	<p>Masyarakat nelayan Teluk Leok yang di sepanjang Sungai Siak, Kec. Rumbai Pesisir kebingungan menjual ikan hasil tangkapan. Tokoh masyarakat setempat, Emmy Kadir, berharap pemerintah memperhatikan kebutuhan nelayan Teluk Leok dan memberi bantuan guna meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.</p>	<p>1</p>	<p>Pemko diharapkan menanggapi saran untuk memperhatikan nelayan Teluk Leok yang terkendala masalah pemasaran hasil tangkapan. Tujuannya, selain untuk meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut juga untuk mewujudkan citra Pemko yang peduli dengan nasib nelayan.</p>

SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Pembayaran Gaji Karyawan	Supermarket Jumbo Mart di Kel. Delima, Kec. Tampan diduga memberi gaji di bawah upah minimum provinsi serta tidak mendaftarkan pegawainya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sekretaris Disnaker Kota Pekanbaru mengatakan pihaknya tidak bisa menindak apabila tidak ada laporan tertulis. Sementara Kepala Disnaker Kota Pekanbaru belum bisa dimintai klarifikasi.	4	Pemko melalui Disnaker perlu segera mengklarifikasi dan menanggapi supermarket Jumbo Mart yang diduga memberi gaji karyawan di bawah ketentuan UMP. Klarifikasi penting dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha menaati peraturan serta menjamin terpenuhinya hak buruh di Kota Pekanbaru.

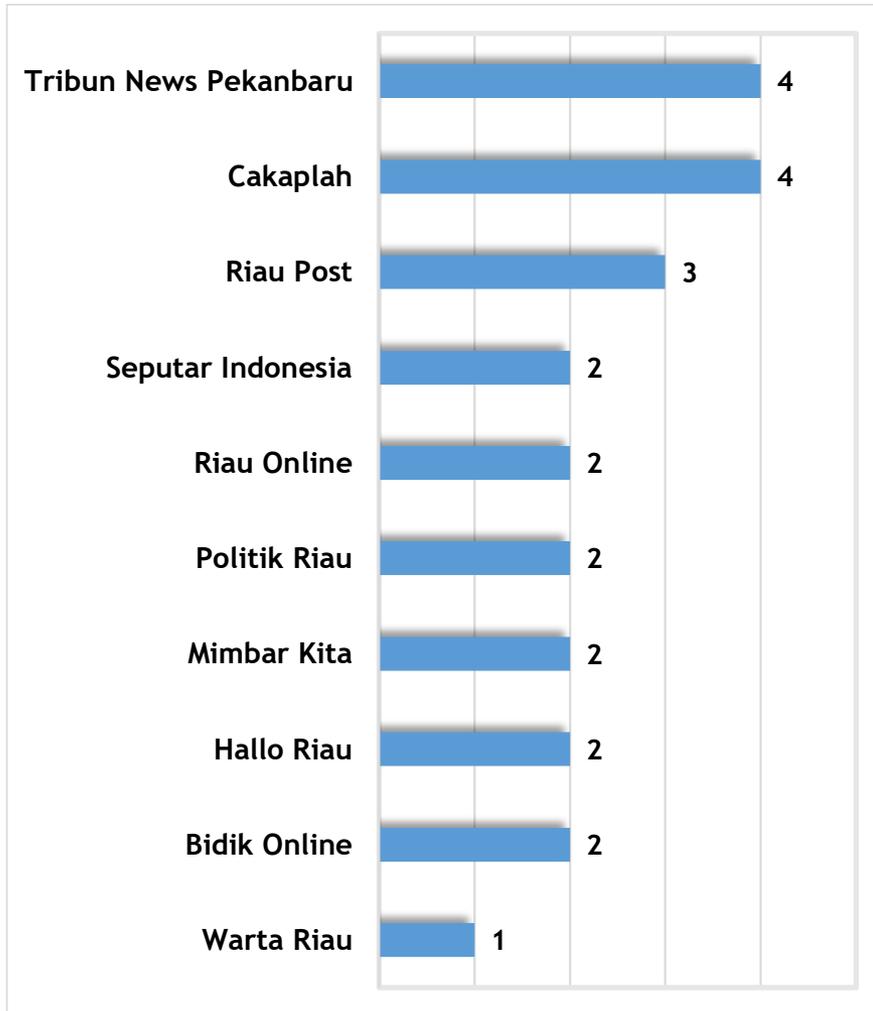
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
<p>Penerbitan IMB dan Izin Usaha</p>	<p>Wali Kota Pekanbaru menginstruksikan dinas terkait untuk memperketat penerbitan izin mendirikan bangunan untuk mencegah terjadinya banjir. Pengembang dan masyarakat yang akan mendirikan bangunan juga diingatkan untuk melengkapi rekomendasi pencegahan banjir.</p>	<p>3</p>	<p>Pemko melalui OPD yang berwenang sebaiknya merespons instruksi Wali Kota Pekanbaru untuk memperketat penerbitan IMB. Hal ini menjadi salah satu langkah koordinatif dan antisipatif menangani banjir di Kota Pekanbaru yang terjadi selama sepekan. Selain itu, pengawasan penerbitan IMB juga penting untuk memastikan pembangunan yang dilakukan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan RTRW Kota Pekanbaru.</p>
<p>Penerbitan IMB dan Izin Usaha</p>	<p>MBC Hotel & Café di Jalan Tuanku Tambusai Ujung belum memiliki izin usaha meskipun sudah beroperasi lebih dari enam bulan. Manejer Operasional MBS Hotel & Cafe, Doni Ramdan, mengatakan pihaknya masih mengurus izin karena sebelumnya dinas terkait menolak permohonan izin operasi. Ketua Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (PP GAMARI), Larshen Yunus, mengatakan pihaknya akan mengusut kasus tersebut dan meminta Pemko serta aparat penegak hukum memperhatikan masalah perizinan MBC Hotel & Café.</p>	<p>2</p>	<p>Pemko sebaiknya menanggapi kasus MBC Hotel & Café yang belum memiliki izin usaha. Tanggapan bisa dilakukan dengan meninjau dan memberi teguran kepada pengelola hotel untuk segera mengurus izin. Hal ini penting agar memastikan pelaku usaha di Pekanbaru menaati aturan serta mencari celah potensi penerimaan PAD bagi Pemko.</p>
<p>Penerimaan CPNS</p>	<p>Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri, berharap Pemko segera menghitung kekurangan tenaga ASN yang akan diajukan untuk penetapan kuota penerimaan CPNS 2019. Pihaknya mengatakan Pemko harus memberi alasan kuat agar kuota CPNS Pemko Pekanbaru dapat bertambah.</p>	<p>1</p>	<p>Pemko diharapkan terus memublikasikan langkah persiapan penerimaan CPNS 2019. Pemko juga perlu mempertimbangkan saran dari Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru untuk menegosiasikan kuota CPNS dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar kekurangan ASN di Pemko segera terpenuhi sehingga bisa mengoptimalkan kinerja Pemko untuk melayani masyarakat.</p>

SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Perayaan HUT Kota Pekanbaru	Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah, menyayangkan perayaan HUT ke-235 Kota Pekanbaru sedikit bersentuhan dengan budaya melayu. Hal ini karena Pemko tidak mengundang tokoh masyarakat adat Kota Pekanbaru untuk menyiapkan acara perayaan. Fathullah mengatakan acara perayaan HUT sebaiknya tidak meninggalkan budaya melayu meskipun digelar tanpa menggunakan APBD Pemko.	3	Pemko melalui OPD yang berwenang sebaiknya merespons kritikan anggota DPRD Kota Pekanbaru yang menilai acara perayaan HUT Kota Pekanbaru minim bersentuhan dengan budaya melayu. Pemko juga dapat memublikasikan agenda persiapan perayaan yang melibatkan tokoh masyarakat adat sehingga Pemko menjadi salah satu pihak yang turut melestarikan budaya masyarakat Kota Pekanbaru.

ADMINISTRASI & PEMERINTAHAN

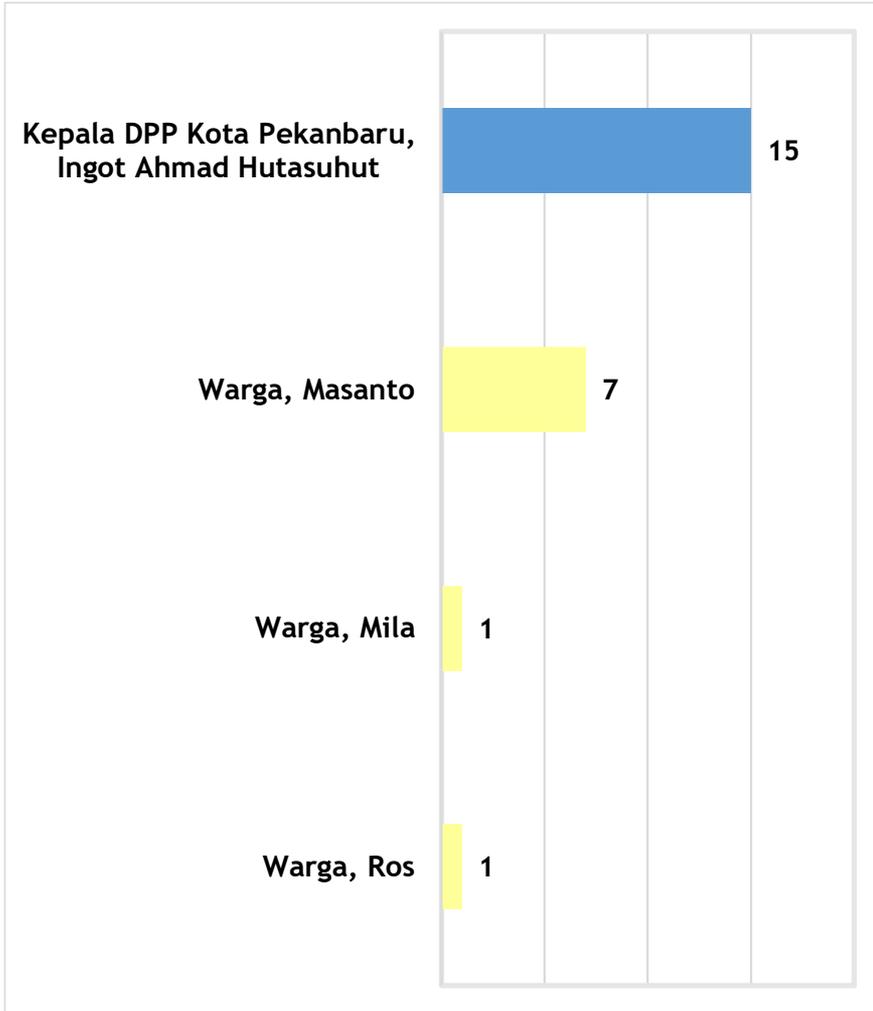


ADMINISTRASI & PEMERINTAHAN



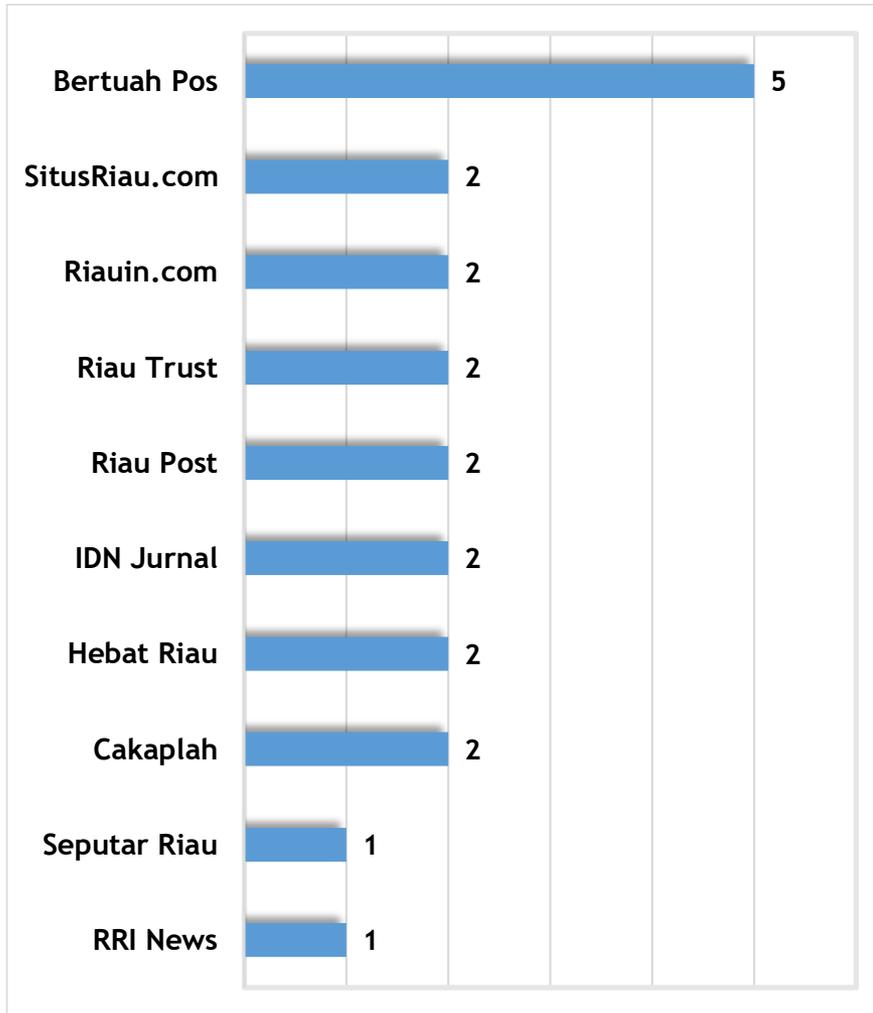
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
<p>Harga Pangan</p>	<p>Harga beberapa bahan pokok seperti cabai merah, bawang merah, dan sayuran masih mahal di Kota Pekanbaru. Warga, Mila, mengeluhkan mahalnya harga cabai merah yang mencapai Rp90.000 per kilogram (kg) serta harga bawang merah mencapai Rp43.000 per kg. Selain itu, harga sayuran seperti tomat, wortel, dan mentimun masih naik di kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per kg.</p>	<p>16</p>	<p>Pemko perlu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Satgas Pangan, Tim Pengendali Inflasi Daerah, serta Bulog untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pangan jelang Ramadhan. Publikasi perkembangan harga pangan juga sebaiknya dilakukan guna meredakan kekhawatiran masyarakat.</p>
<p>Gagal Panen</p>	<p>Cuaca yang tidak menentu di Kota Pekanbaru menyebabkan petani sayur di Jalan Kubang Raya gagal panen dan merugi. Salah satu petani, Masanto, mengaku tanaman di lahannya banyak yang layu dan tidak bisa dijual. Meskipun demikian, kegagalan panen tersebut dinilai tidak memengaruhi harga sayur yang relatif normal di pasaran.</p>	<p>7</p>	<p>Pemko sebaiknya merespons petani sayur yang gagal panen akibat cuaca tidak menentu di Kota Pekanbaru. Meskipun tidak mempengaruhi harga sayur di pasaran, respons Pemko dilakukan guna mengantisipasi kerugian yang dialami petani akibat gagal panen sekaligus mewujudkan citra Pemko yang memperhatikan kepentingan petani.</p>

EKONOMI



- Pemerintah
- Ormas
- Politisi
- LSM
- Masyarakat
- Akademisi

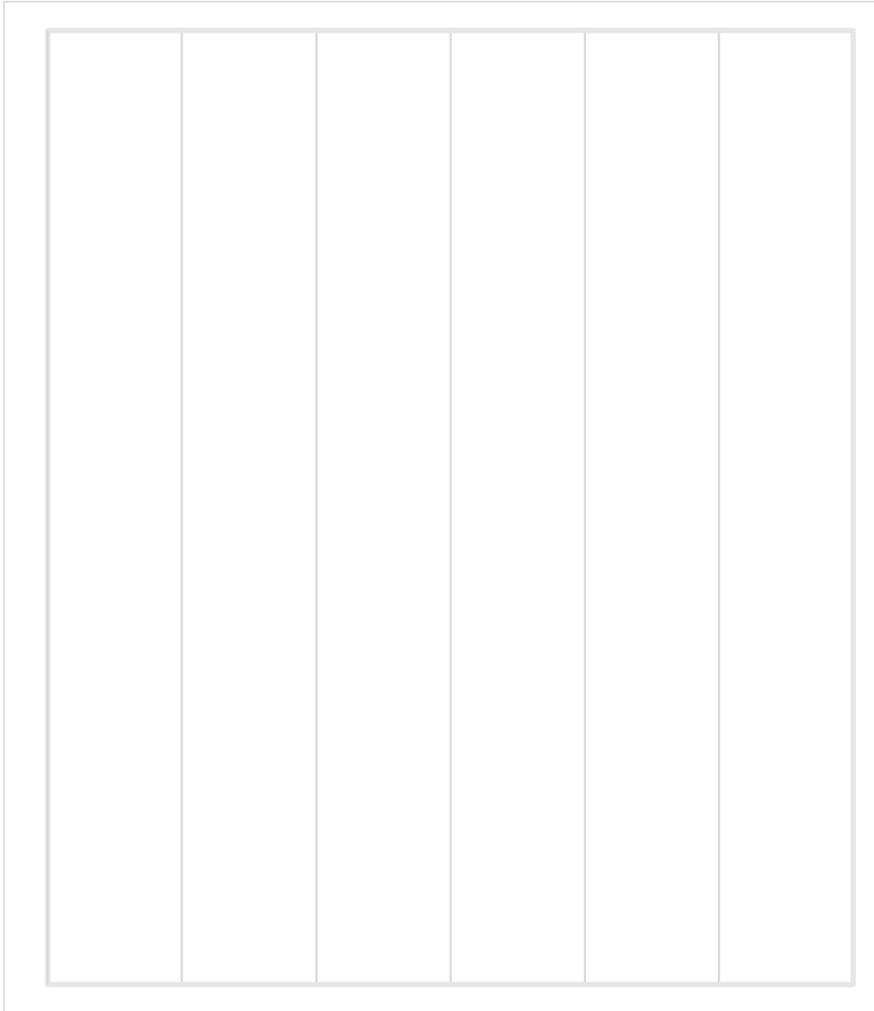
EKONOMI



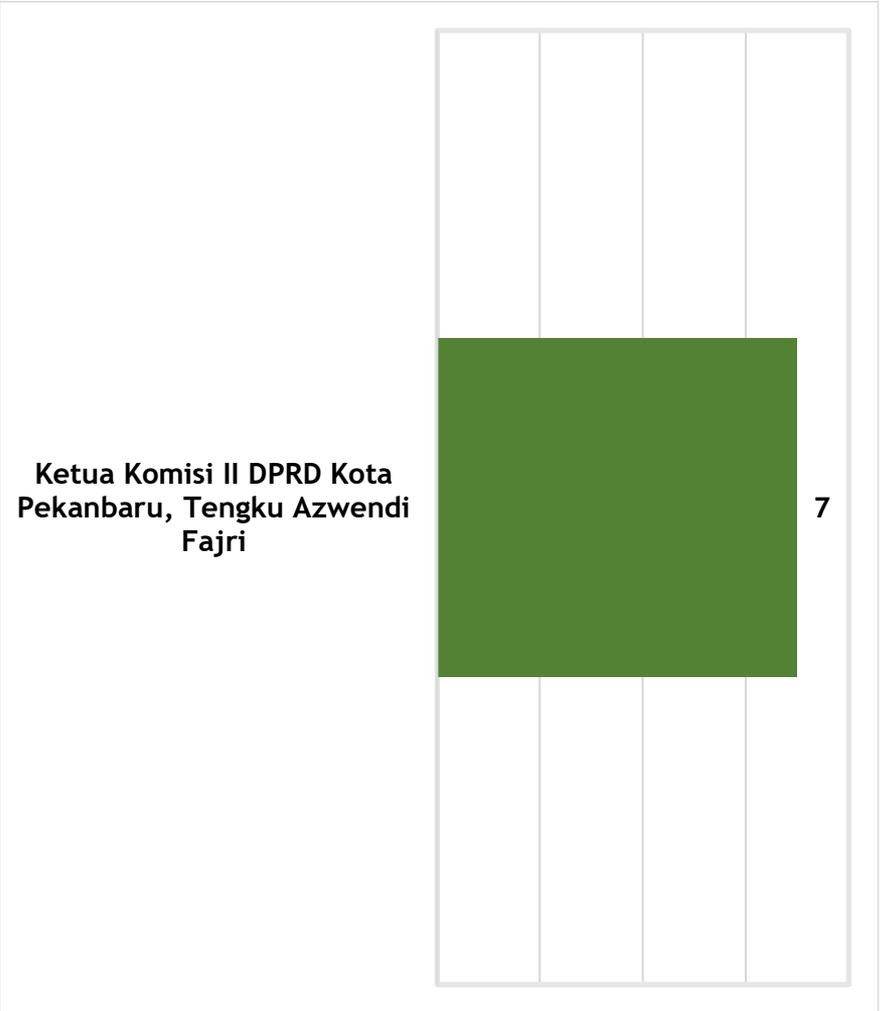
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Korupsi	Laporan dugaan korupsi Pekerjaan jalan hotmix menuju tempat pembuangan sampah yang disampaikan ke Inspektorat Kota Pekanbaru belum selesai diproses sejak dua bulan lalu. Media Realita Online menduga Inspektorat berupaya menutupi kasus dugaan korupsi tersebut mengingat pejabat penanggungjawab kegiatan merupakan kerabat Wali Kota Pekanbaru. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Pekanbaru masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat untuk menyelidiki perkara tersebut.	1	Inspektorat Kota Pekanbaru perlu segera menanggapi berita terkait lamanya pemeriksaan dugaan korupsi pembangunan jalan hotmix menuju tempat pembuangan sampah. Hal ini penting untuk mengklarifikasi dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemko sekaligus mendorong pelaksanaan pemerintahan yang berintegritas.

SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Pembangunan Pasar	Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, mempertanyakan progres pembangunan Pasar Induk Pekanbaru yang terhenti. Azwendi meminta Wali Kota dan dinas terkait bekerja profesional serta tegas menyikapi investor pembangunan Pasar Induk agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.	7	Pemko melalui OPD yang berwenang perlu segera menanggapi kritikan Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru yang menyoroti mangkraknya pembangunan Pasar Induk. Tanggapan penting dilakukan guna memastikan rencana pembangunan yang dilakukan Pemko berjalan lancar sehingga dapat segera dimanfaatkan masyarakat.

HUKUM & KRIMINALITAS

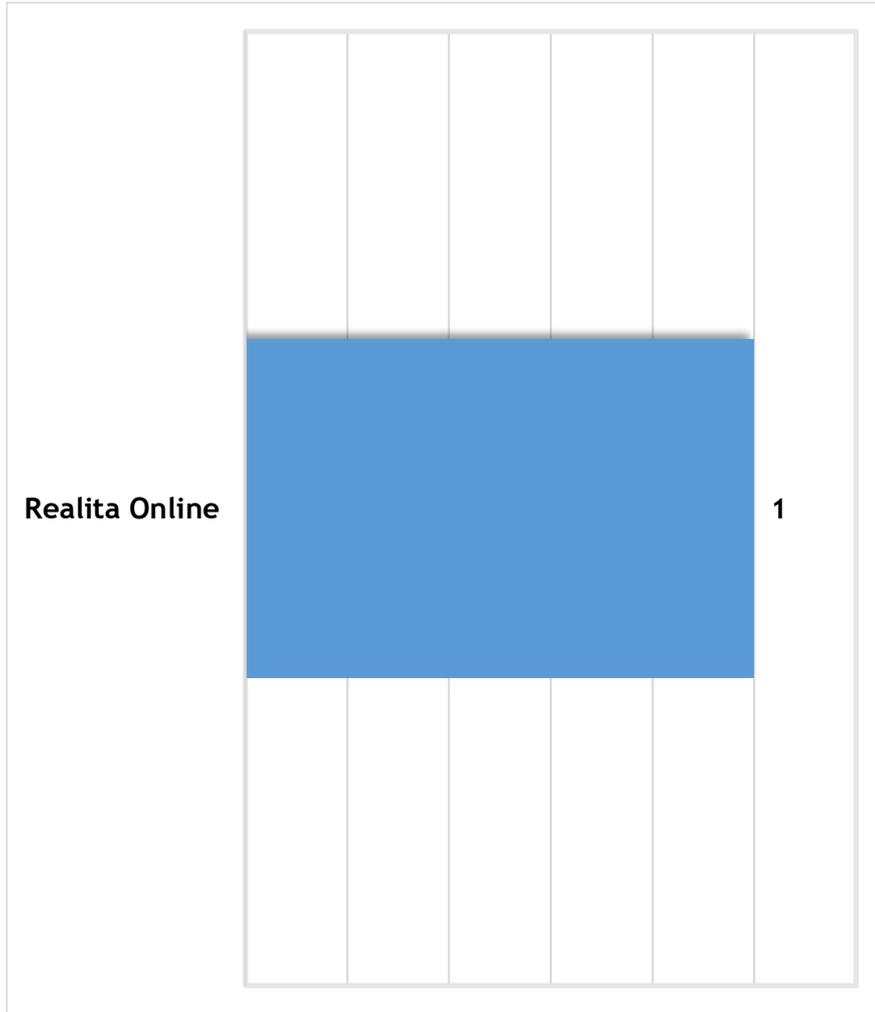


INFRASTRUKTUR

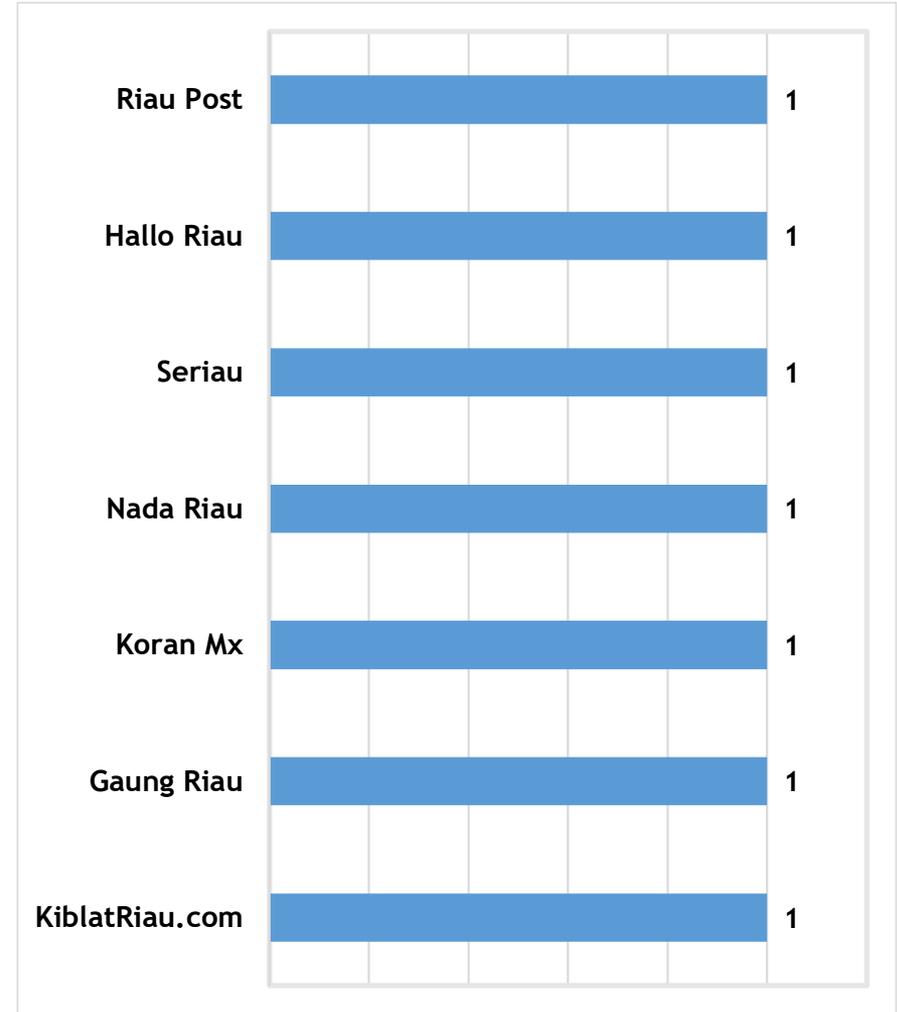


- Pemerintah
- Ormas
- Politisi
- LSM
- Masyarakat
- Akademisi

HUKUM & KRIMINALITAS



INFRASTRUKTUR

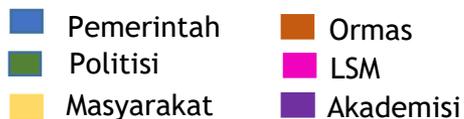
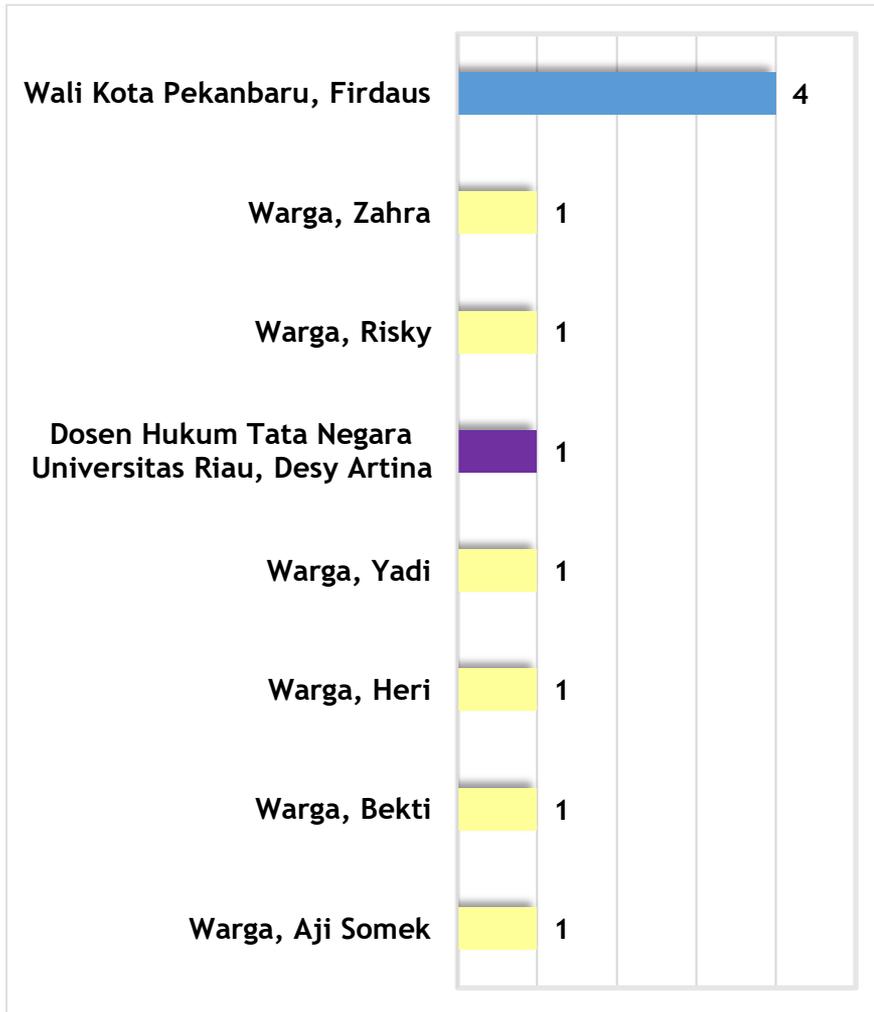


SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
<p>Jalan Rusak</p>	<p>Warga di Pekanbaru, Aji Somek, mengeluhkan banyak jalan rusak dan berlubang saat musim hujan serta kondisi jalan yang gelap tanpa penerangan di malam hari dinilai membahayakan pengendara. Jalan Rajawali di Kec. Sukajadi yang rusak ditambah dengan bau busuk sampah di pinggir jalan juga dikeluhkan warga yang tidak nyaman saat melintas. Warga berharap jalan rusak segera diperbaiki.</p> <p>Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, meminta DPUPR menyampaikan informasi apa adanya terkait jalan rusak di Pekanbaru dan tidak semua jalan menjadi kewenangan Pemko. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Riau, Desy Artina, mengatakan masyarakat dapat menggugat pemerintah terkait jalan rusak dengan merujuk pada undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengingat pemerintah wajib menjamin keselamatan warga di jalan.</p>	<p>9</p>	<p>DPUPR Kota Pekanbaru diharapkan terus memublikasikan upaya perbaikan jalan rusak yang kerap dikeluhkan masyarakat. DPUPR Kota Pekanbaru juga sebaiknya berkoordinasi dengan OPD yang berwenang untuk mencegah laka lantas di wilayah jalan rusak seiring perbaikan dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat mendapat akses jalan yang aman dan nyaman.</p>
<p>Parkir Liar</p>	<p>Masih banyak warga yang memarkirkan kendaraan di sepanjang flyover Simpang Tuanku Tambusai hanya untuk berfoto di area tersebut. Salah satu pengendara yang melintas, Zahra, mengkhawatirkan keselamatan warga yang memarkirkan kendaraan dan pengendara yang melintas karena hal tersebut dinilai membahayakan.</p>	<p>1</p>	<p>Pemko melalui OPD yang berwenang perlu berkoordinasi untuk menertibkan pengendara yang memarkir kendaraan di sepanjang flyover Simpang Tuanku Tambusai. Hal ini penting mengingat berita terkait parkir liar di kawasan tersebut muncul berulang dan belum ada langkah tegas dari Pemko untuk menertibkannya. Selain itu, penertiban juga penting untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan seperti laka lantas.</p>

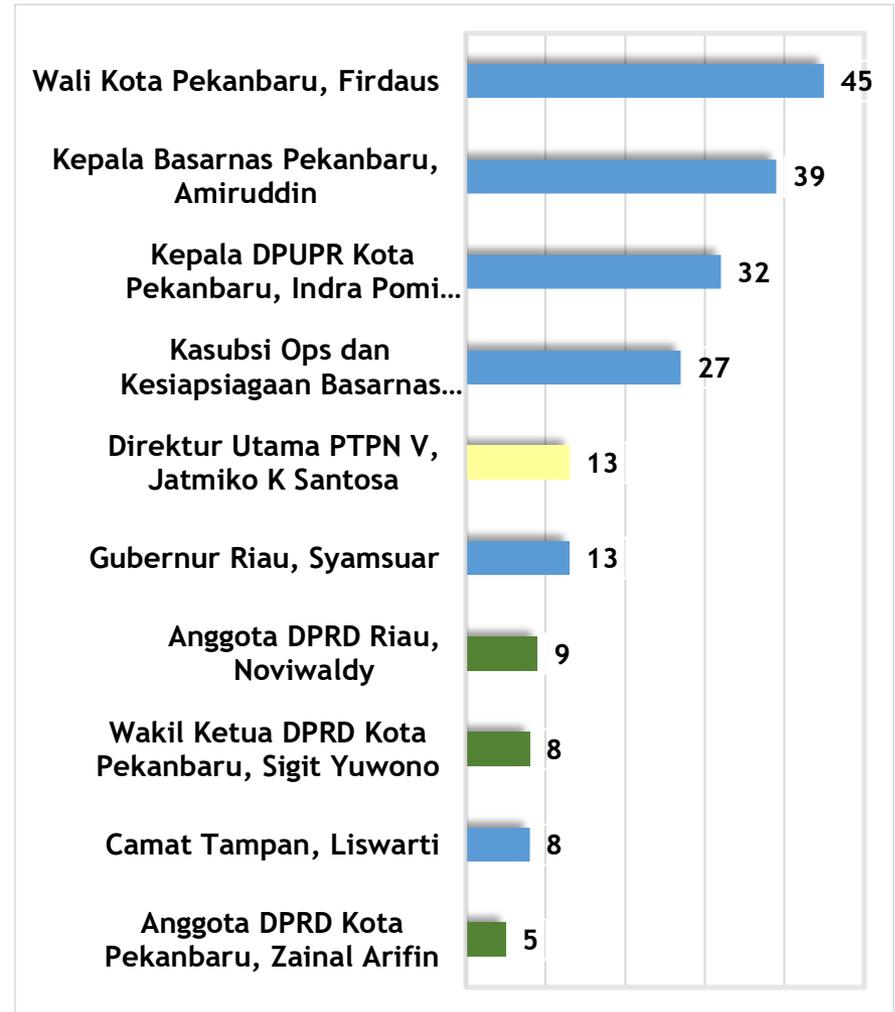
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Kemacetan Lalin	Hujan deras yang menimbulkan genangan air di berbagai ruas jalan menyebabkan kemacetan salah satunya di Jalan HR Soebrantas, Selasa (18/6). Pengendara diharapkan mengambil jalur alternatif untuk menghindari macet dan genangan air.	1	Pemko melalui Dishub perlu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi kemacetan akibat banjir di sejumlah titik jalan di Pekanbaru. Pengaturan lalu lintas penting dilakukan agar masyarakat mendapat informasi jalan alternatif sekaligus mencegah laka lantas akibat banjir.

SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
<p>Banjir</p>	<p>Banjir kembali menggenangi pemukiman dan jalan di beberapa wilayah pada Selasa (18/6) akibat meluapnya Sungai Bintungan serta tersumbatnya drainase di jalanan Kota Pekanbaru. Peristiwa tersebut juga menewaskan seorang perempuan karena terjatuh ke parit di Jalan Lobak, Kec. Tampan, menyebabkan kemacetan di beberapa titik, serta menghanyutkan satu mobil warga di Kec. Tampan. Wali Kota Pekanbaru menginstruksikan DPUPR segera menormalisasi Sungai Bintungan berkoordinasi dengan Pemkab Kampar untuk mengatasi banjir.</p> <p>Sementara itu, anggota DPRD Riau, Noviwaldy, menilai Pemko belum maksimal menangani banjir dan seharusnya membangun sistem drainase yang layak. Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, juga menilai korban jiwa akibat banjir menjadi pelajaran bagi masyarakat dan pemerintah untuk segera mencari solusi permasalahan banjir. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono, juga meminta DPUPR memasang pembatas drainase jalan yang terbuka guna menghindari kecelakaan.</p>	<p>221</p>	<p>Pemko perlu segera berkoordinasi dengan pihak yang berwenang untuk mengatasi banjir di Pekanbaru. Selain mitigasi bencana, Pemko juga perlu terus memublikasikan rencana yang akan dilakukan untuk mengantisipasi banjir terjadi kembali. Hal ini penting untuk merespons banyak keluhan warga serta kritikan berbagai pihak terkait ketidakmampuan Pemko mencari solusi pencegahan banjir di Pekanbaru.</p>

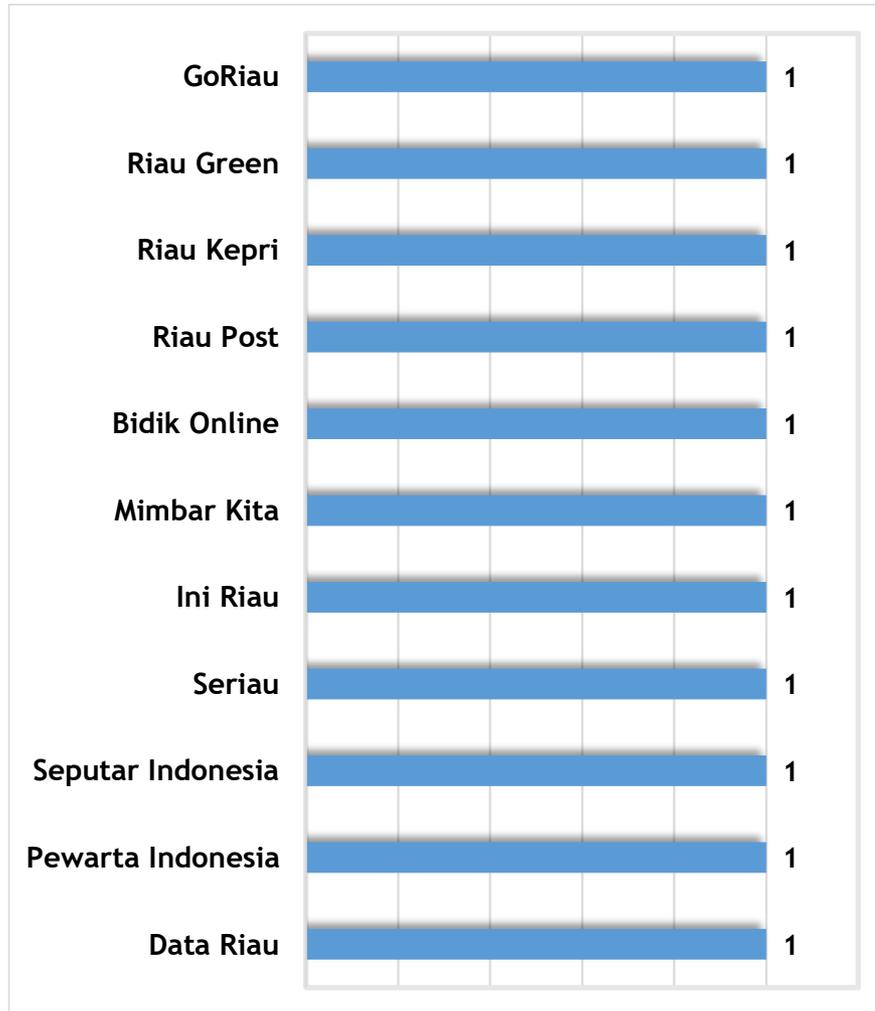
TRANSPORTASI



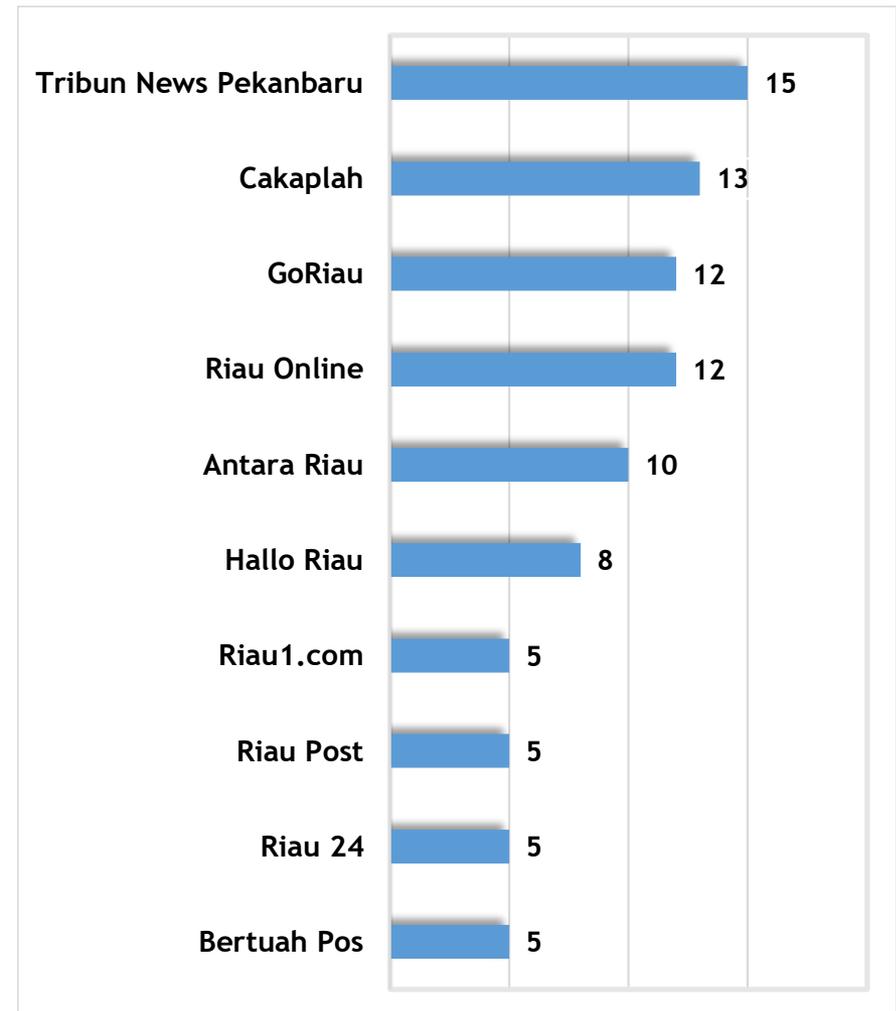
KEBENCANAAN



TRANSPORTASI

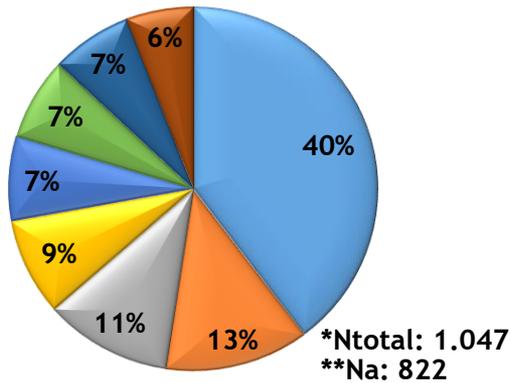


KEBENCANAAN



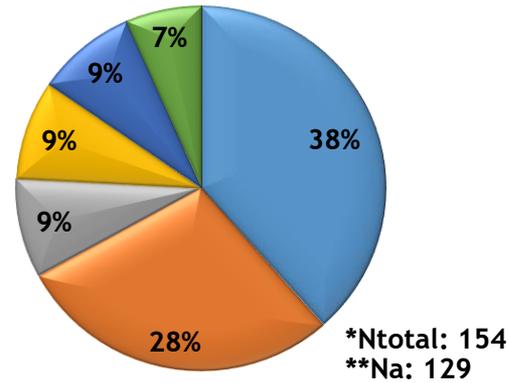
PERBANDINGAN PERISTIWA DAERAH & KEPALA DAERAH

PERISTIWA DAERAH



- Banjir di Pekanbaru
- Ketua PGRI Riau Syahril Meninggal Dunia
- Puncak Perayaan HUT ke-235 Kota Pekanbaru
- Pelaksanaan PPDB 2019
- Peredaran Narkoba di Pekanbaru
- Persiapan Jemaah Calon Haji di Pekanbaru
- Pemko Gelar Aksi Bersih Sungai Siak

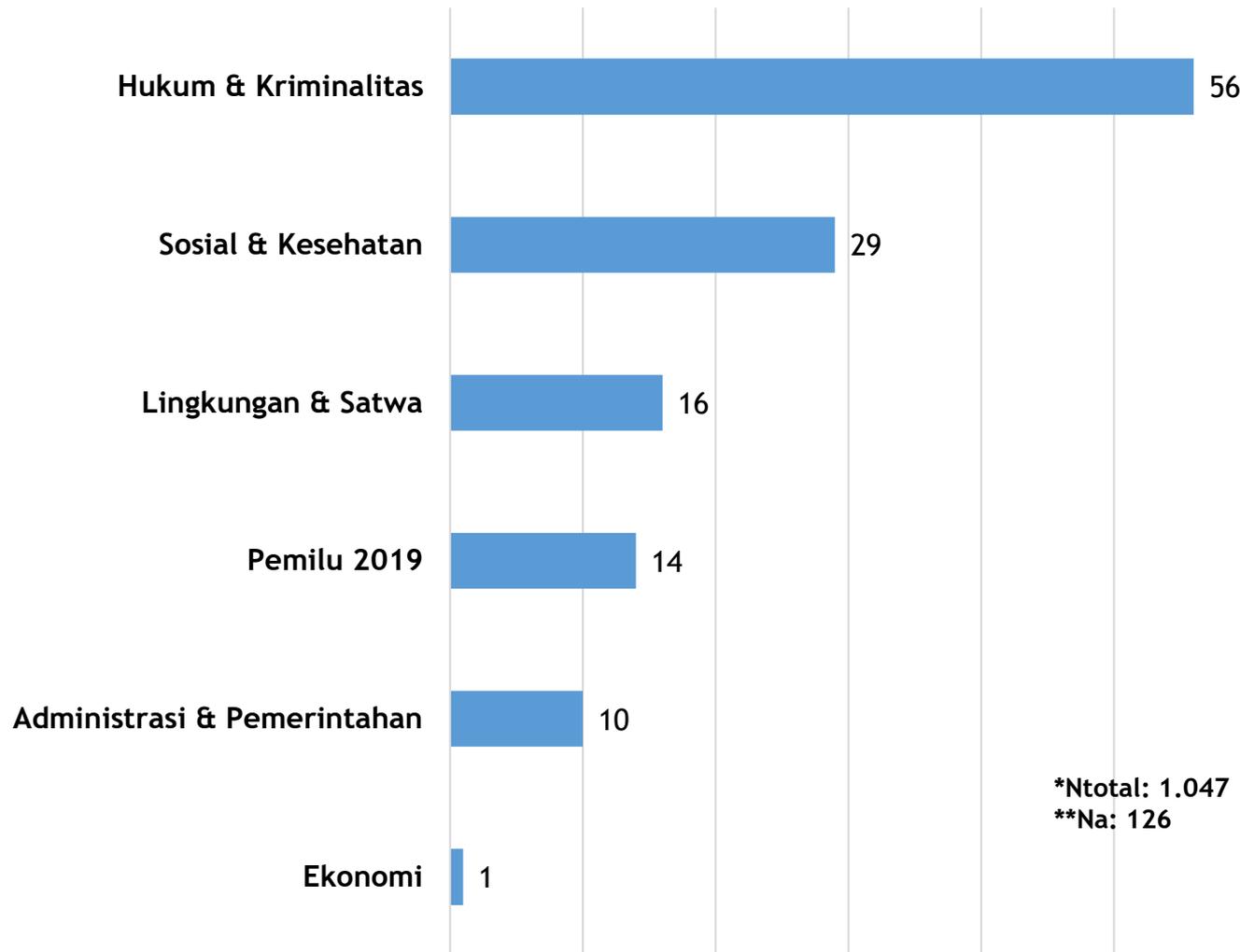
PERISTIWA KEPALA DAERAH



- Tanggapi Banjir di Pekanbaru
- Lakukan Aksi Bersih Sungai Siak
- Minta DPUPR Perketat Perizinan IMB untuk Antisipasi Banjir
- Beraudiensi dengan KONI Pekanbaru Bahas Program Olahraga Berbasis Wisata
- Nyatakan Pemko Akan Buat 24 Sekolah Modern dengan Kurikulum 2013
- Nyatakan Embarkasi Haji Antara Riau Terus Dibenahi

Banjir di Pekanbaru menjadi peristiwa dominan Kota Pekanbaru. Sementara itu, Wali Kota menanggapi peristiwa banjir di Pekanbaru menjadi peristiwa dominan Kepala Daerah Pekanbaru.

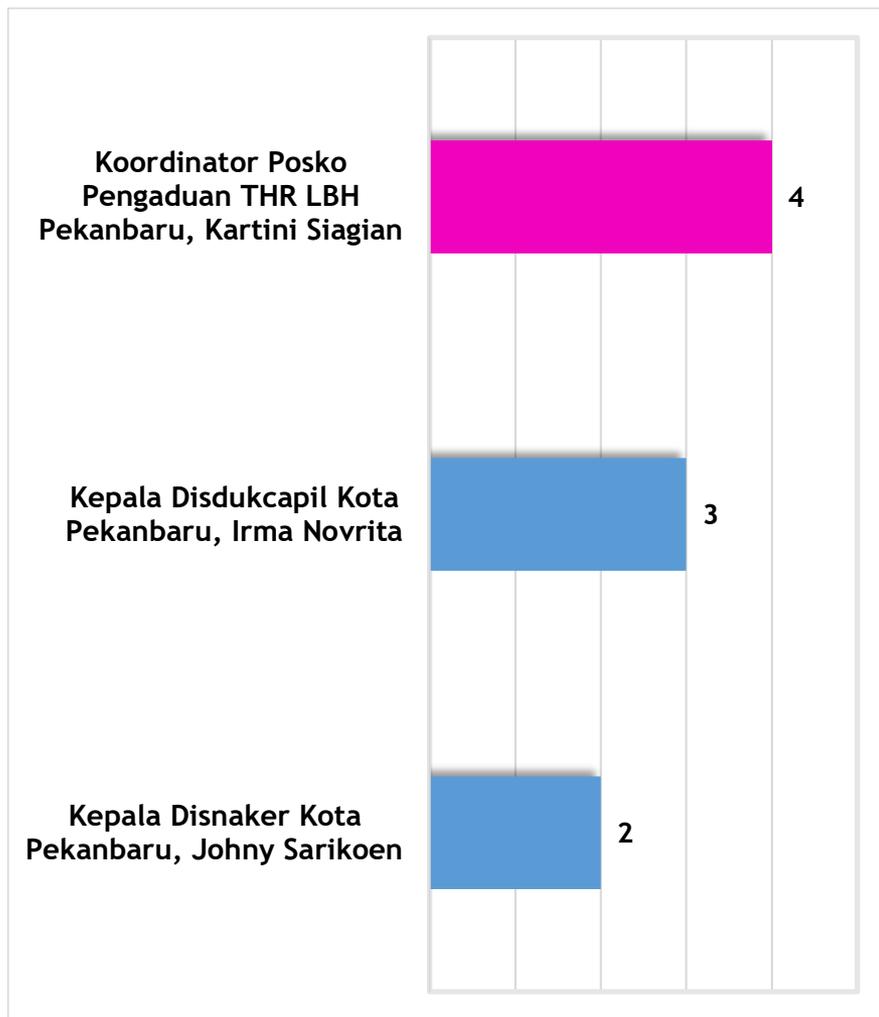
PERISTIWA EKSTERNAL PEMKO



SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Penyaluran THR	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru menerima 7 pengaduan tenaga kerja yang belum menerima tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan tempatnya bekerja di Pekanbaru. Koordinator Posko Pengaduan THR LBH Pekanbaru, Kartini Siagian, mengatakan pihaknya akan melayangkan somasi ke sejumlah perusahaan yang tidak menyalurkan THR serta melaporkan masalah tersebut ke Disnaker Provinsi Riau. Sementara itu, Disnaker Kota Pekanbaru mengaku tidak ada pengaduan terkait pembayaran THR yang diterima pihaknya.	7
Pendataan Penduduk	Masih sedikit warga yang mengajukan pindah datang ke Disdukcapil Kota Pekanbaru. Kepala Disdukcapil Kota Pekanbaru, Irma Novrita, akan meminta RT/RW untuk aktif memantau dan melaporkan warga pendatang serta meminta warga tersebut mengurus surat pindah datang.	3

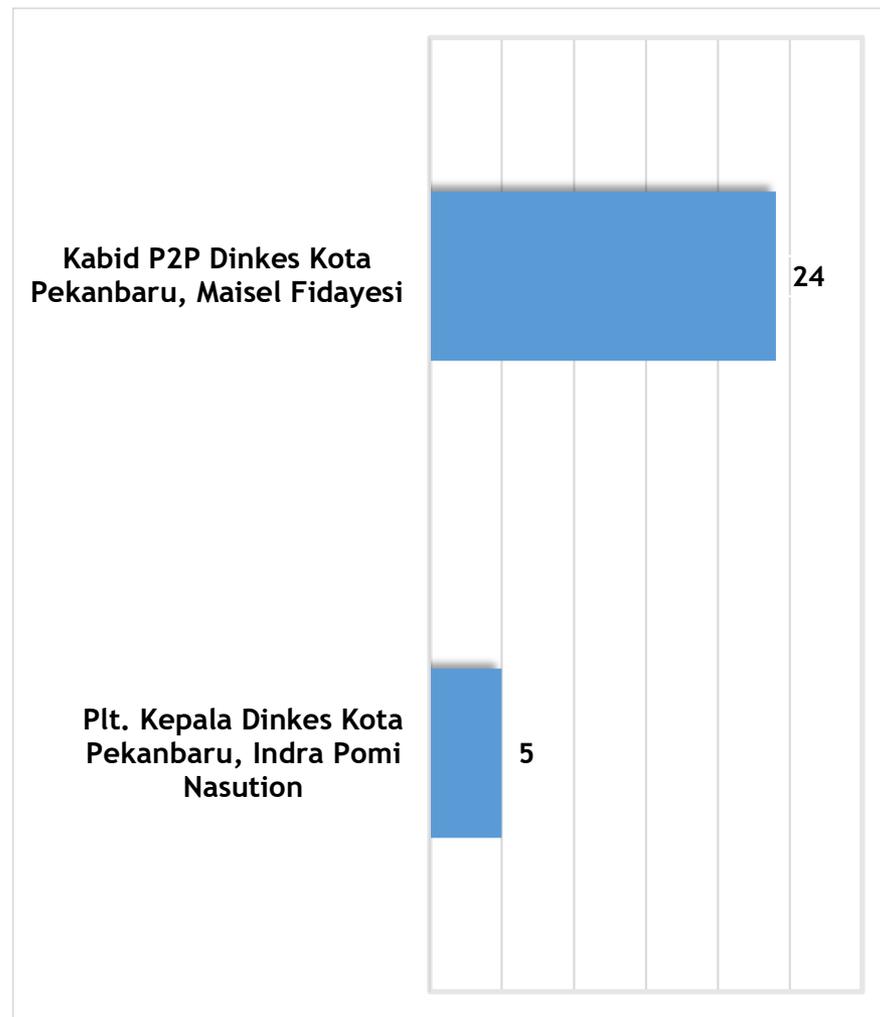
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Penyebaran Penyakit	Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Pekanbaru hingga awal Juni 2019 mencapai 229 kasus. Kabid P2P Dinkes, Maisel Fidayesi, mengatakan peningkatan signifikan kasus DBD terjadi di Kec. Payung Sekaki serta terus mengimbau masyarakat agar memperhatikan kebersihan lingkungan.	29

ADMINISTRASI & PEMERINTAHAN

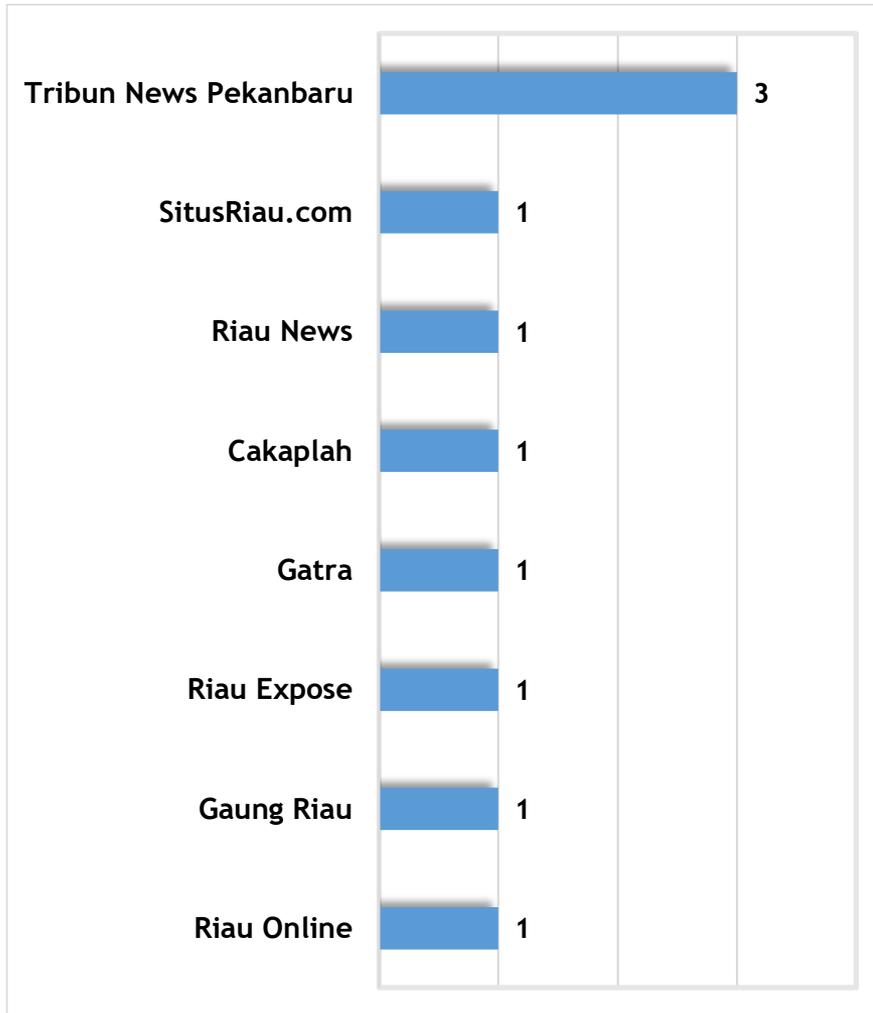


- Pemerintah
- Ormas
- Politisi
- LSM
- Masyarakat
- Akademisi

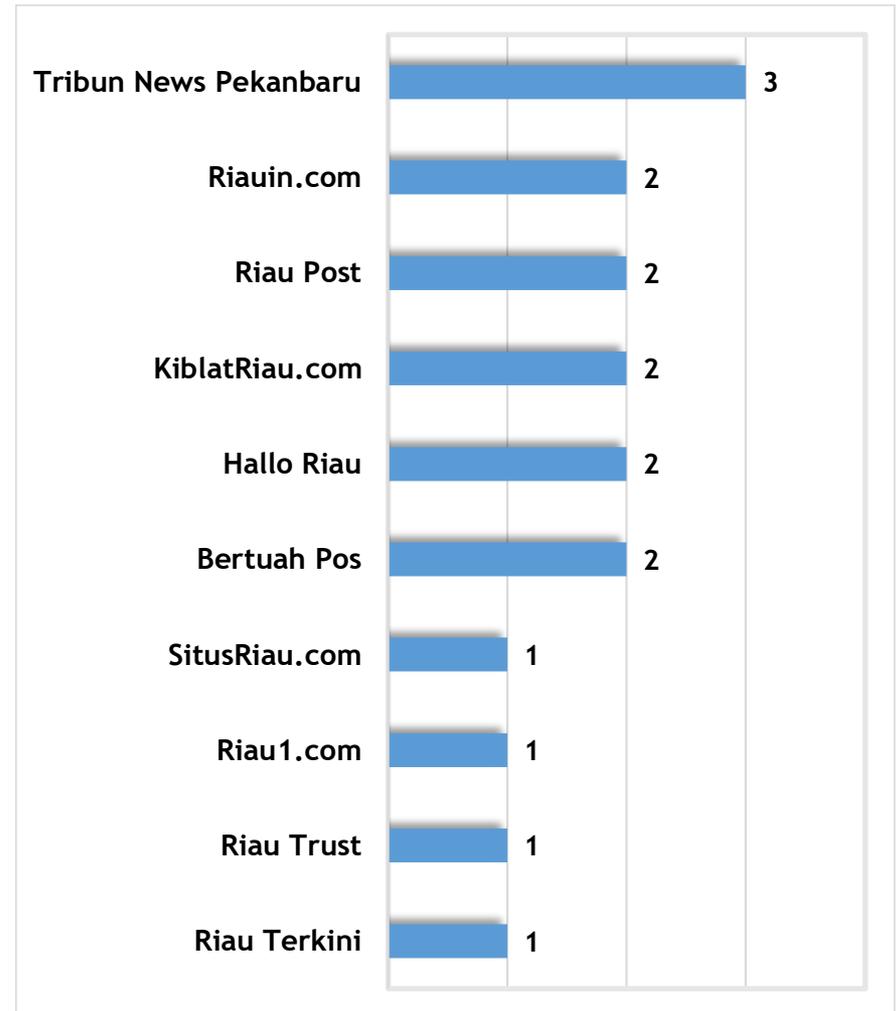
SOSIAL & KESEHATAN



ADMINISTRASI & PEMERINTAHAN



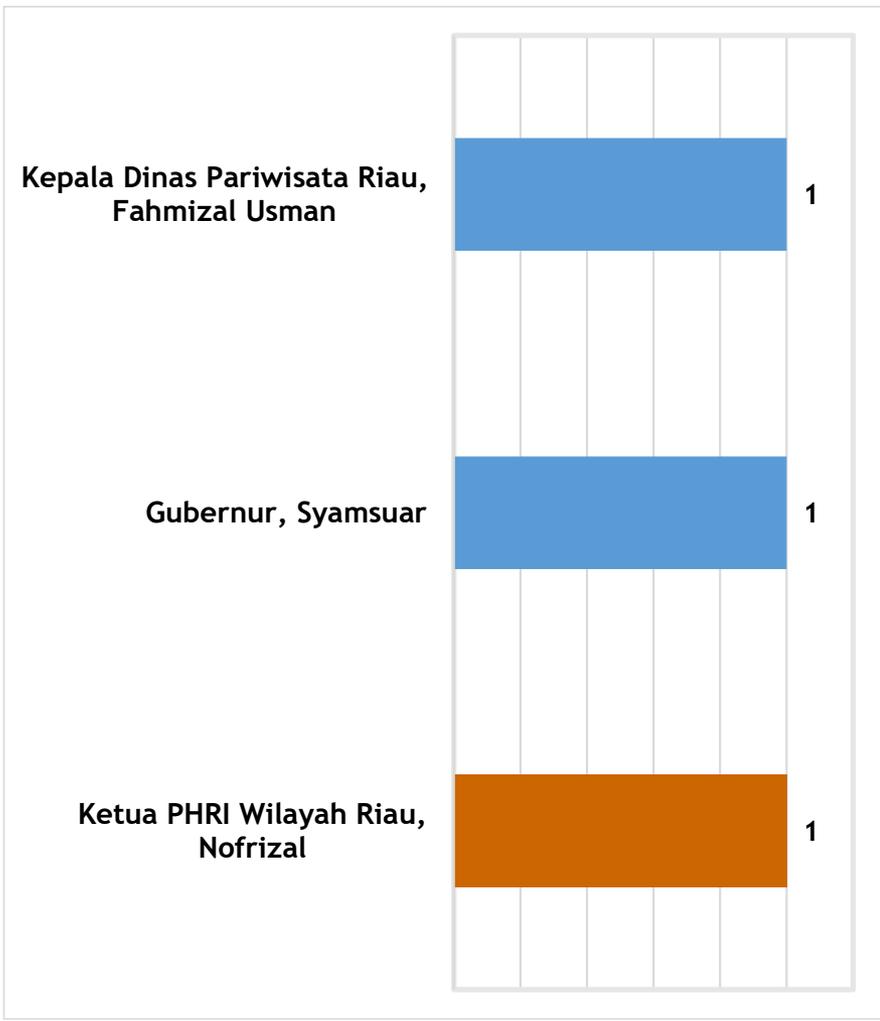
SOSIAL & KESEHATAN



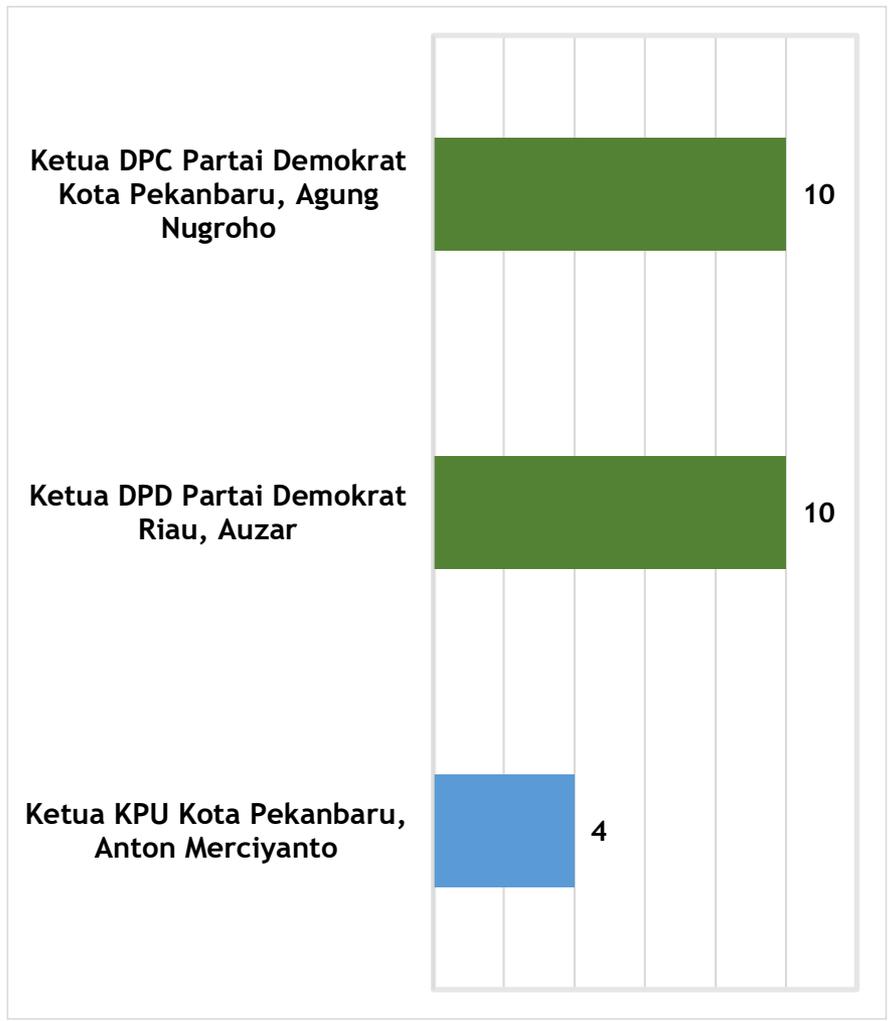
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPLOS	REKOMENDASI
Persaingan Tarif Hotel	Kenaikan harga tiket pesawat menyebabkan sejumlah hotel di Pekanbaru perang tarif. Sejumlah hotel berbintang memasang tarif promo yang semakin murah hingga nyaris sama dengan hotel non bintang. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia wilayah Riau, Nofrizal, mengatakan penurunan tarif hotel dilakukan karena tamu hotel terus berkurang serta meminta pemerintah menghentikan izin hotel baru mengingat banyaknya hotel di Pekanbaru.	1

SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
<p>Isu KLB Partai Demokrat</p>	<p>Partai Demokrat Kota Pekanbaru menolak desakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang disampaikan Presidium Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD). GMPPD sebelumnya menilai KLB Demokrat bisa menyelamatkan nasib partai sebab terjadi penurunan prestasi partai sejak Pileg 2009 hingga 2019. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan kondisi partai dalam keadaan baik dari pusat hingga daerah sehingga tidak mengharuskan digelar KLB.</p>	<p>10</p>	<p>.....</p>
<p>Penetapan Perolehan Kursi DPRD</p>	<p>Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru meminta Partai Keadilan Sejahtera segera menyerahkan pemberitahuan resmi tentang meninggalnya calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru terpilih, Syahril. Hal ini penting sebelum KPU menetapkan perolehan kursi di DPRD Kota Pekanbaru.</p>	<p>4</p>	<p>.....</p>

EKONOMI

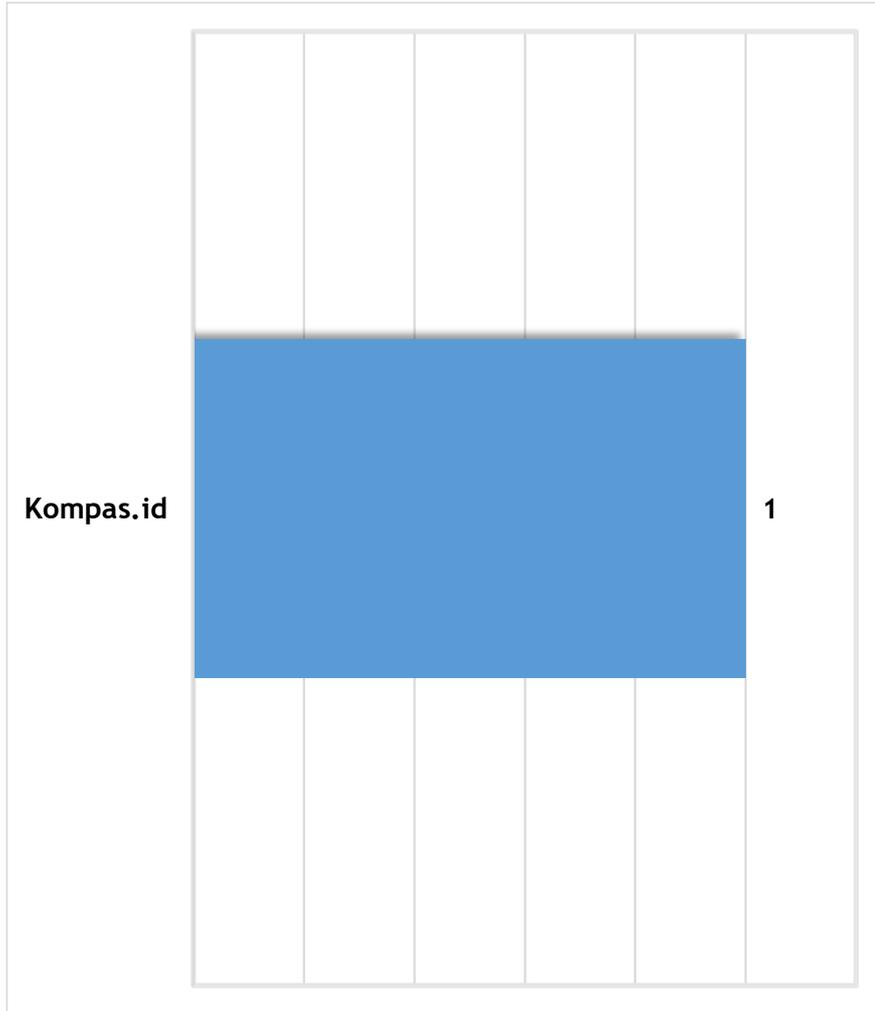


PEMILU 2019

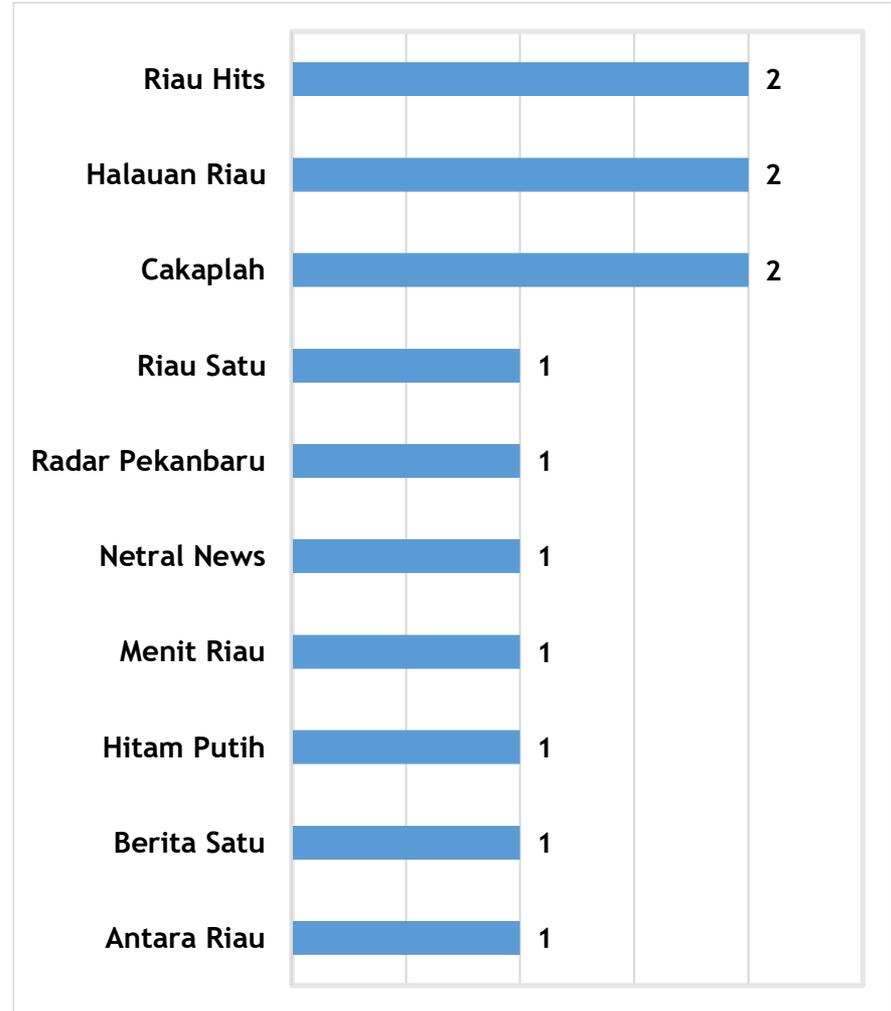


- Pemerintah
- Ormas
- Politisi
- LSM
- Masyarakat
- Akademisi

EKONOMI



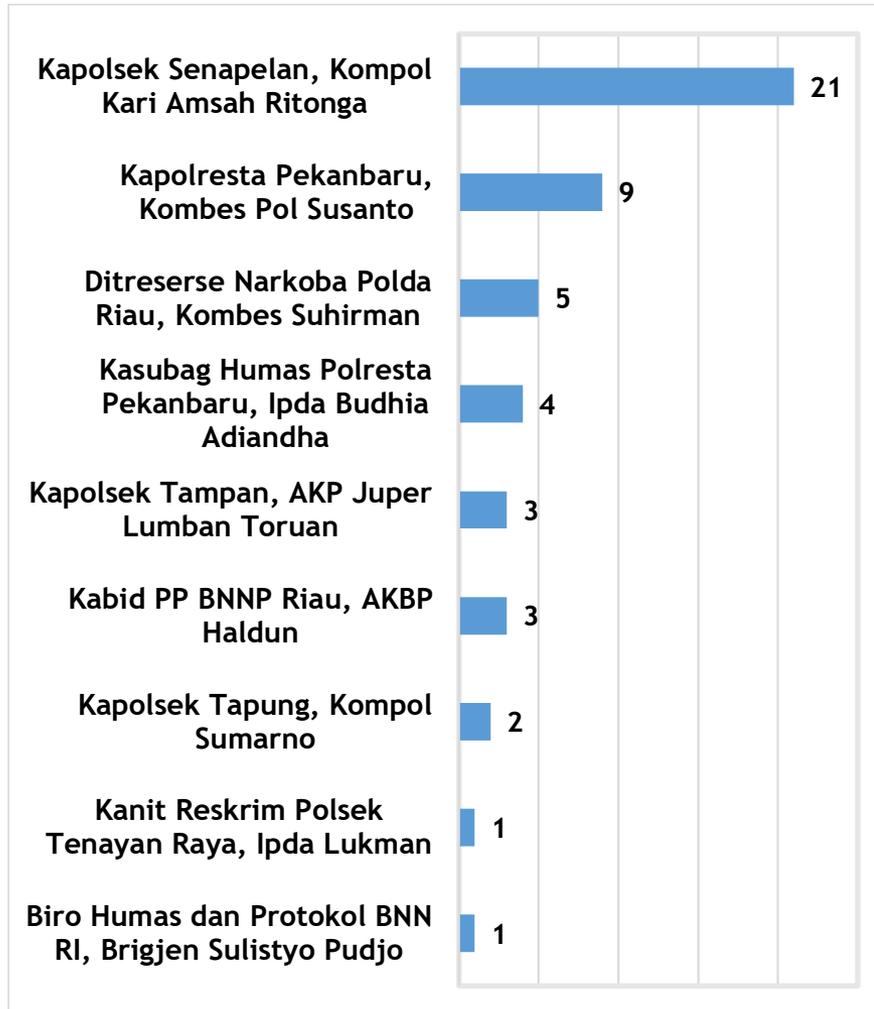
PEMILU 2019



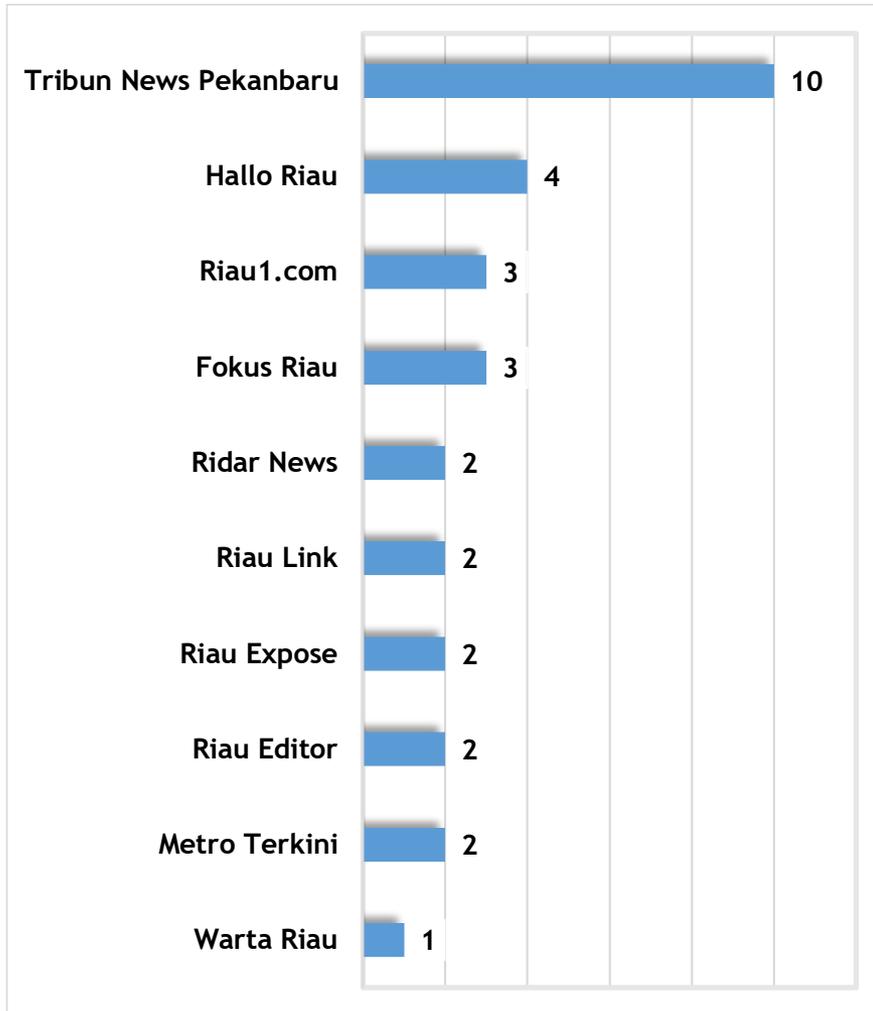
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
<p>Percobaan Bunuh Diri</p>	<p>Seorang laki-laki, inisial E, ditemukan tidak sadarkan diri dan diduga melakukan percobaan bunuh diri di kamar Hotel Rainbow, Kec. Senapelan, Rabu (12/6). Kapolsek Senapelan, Kompol Kari Amsah Ritonga, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah barang bukti berupa racun dan senjata tajam di tempat kejadian perkara.</p>	<p>2</p>	<p>.....</p>
<p>Narkoba</p>	<p>Polsek Senapelan mengamankan narkoba senilai Rp1,74 miliar dari seorang pria berinisial YH yang ditangkap di Kec. Tampan. Penangkapan tersebut diawali dari informasi warga tentang transaksi narkoba pada Jumat (31/5). Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau juga mengamankan lima orang yang diduga terlibat mengebarkan sabu dan ekstasi di Kec. Rumbai, Minggu (16/6). Selain itu, Polsek Tapung mengamankan pengedar sabu berinisial AK, Senin (17/6).</p>	<p>30</p>	<p>.....</p>

SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Tindak Kejahatan	Polresta Pekanbaru mengamankan pelaku penjambretan, inisial FK, terhadap seorang wanita di Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Sabtu (15/6).	4
	Polsek Tenayan Raya berhasil menangkap pelaku pencurian, inisial GS, yang melakukan aksinya di Kel. Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya, Sabtu (16/6). Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan warga dan menyelidiki pergerakan barang hasil curian yang diperjualbelikan di toko online.	1
	Enam orang mengalami luka-luka akibat keributan yang berujung penganiayaan di Pujasera Jalan Riau, Kota Pekanbaru, Minggu (16/6). Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Susanto, mengatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah orang yang terlibat perselisihan.	9
	Polsek Senapelan meringkus pelaku pencurian, Ujang Miskin, yang melakukan aksinya di Jalan Lili Pekanbaru pada Jumat (7/6) lalu.	4
	Polsek Tampan meringkus seorang ibu rumah tangga, inisial KS, yang diduga menjadi penadah sepeda motor curian, Kamis (20/6). Kapolsek Tampan, AKP Juper Lumban, mengatakan penangkapan dilakukan saat tersangka tidak bisa menunjukkan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor yang ditemukan di tempatnya.	1

HUKUM & KRIMINALITAS

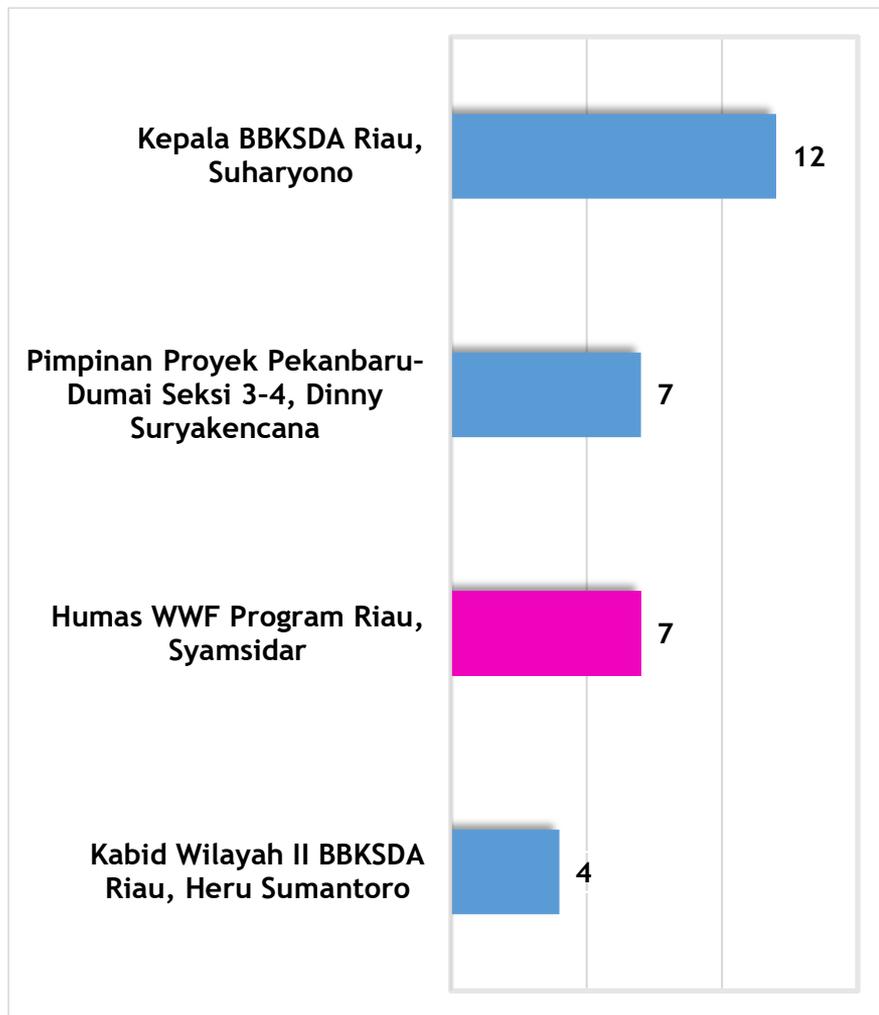


HUKUM & KRIMINALITAS



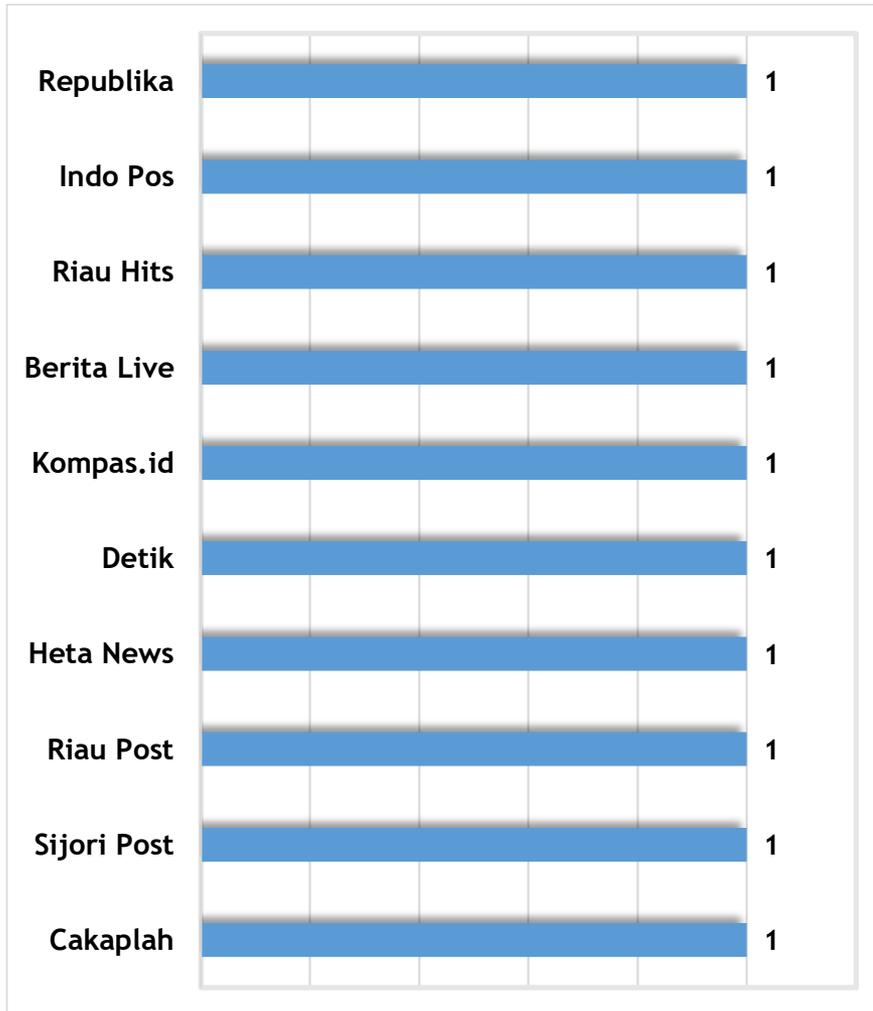
SUB SEKTOR	PERSOALAN	EKSPOS	REKOMENDASI
Serangan Gajah Liar	Sebanyak 11 ekor gajah liar masuk di Kec. Rumbai yang menjadi wilayah perbatasan Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Wilayah II Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Heru Sumantoro, mengatakan meningkatnya aktivitas gajah liar di area perkebunan warga disebabkan karena banyak area kebun yang ditinggalkan pemiliknya jelang mudik Lebaran.	15

LINGKUNGAN & SATWA



- Pemerintah
- Ormas
- Politisi
- LSM
- Masyarakat
- Akademisi

LINGKUNGAN & SATWA



Pekanbaru, 24 JUNI 2019
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEKANBARU

Drs.M. YUSUF .M,Pd
NIP. 19650620 199203 1 006